

DINAMIKA

Nasional Demokrat Jateng Buka Posko

WAKIL Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih meminta para pengurus dan simpatisan organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat membentuk posko di setiap kabupaten dan kota Jawa Tengah. "Selain sebagai tempat menampung berbagai aspirasi masyarakat, posko juga bisa untuk menggalang rakyat yang akan bergabung ke Nasional Demokrat," kata Rustriningsih saat rapat koordinasi dengan Koordinator Wilayah Nasional Demokrat Kabupaten/Kota se-Jateng di Semarang, kemarin.

Menurut Rustriningsih, dengan adanya posko-posko itu, pihaknya optimis sebelum pelaksanaan deklarasi Nasional Demokrat Jawa Tengah pada 23 Januari 2011 dapat terkumpul 1 juta anggota Nasional Demokrat Jateng. Selain pucuk pimpinan Nasional Demokrat seperti Surya Paloh dan tokoh-tokoh nasional lainnya, direncanakan pimpinan 35 pemerintahan kabupaten/kota se-Jateng bakal menghadiri Deklarasi Nasional Demokrat Jateng di GOR Basket Jatidiri Semarang, Minggu (23/1). (HT/P-3)

Rekor Muri LSI Dipertanyakan

PENGHARGAAN Museum Rekor Indonesia (Muri) yang diraih Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dipertanyakan. Pasalnya, pemecahan rekor *quick count* (penghitungan cepat) dengan selisih 0,00% yang diraih LSI pada pemungutan suara ulang di Pemilu Kada Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, November silam dinilai tidak pantas disebut *quick count* karena hanya dilakukan di 25 tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu, pihak LSI juga tidak menjabarkan metodologi yang digunakan.

Menurut peneliti senior LSI Burhanuddin Muhtadi, jika penghitungan cepat hanya dilakukan di 25 TPS, tidak pantas disebut *quick count*. Tapi lebih tepat *real count* atau *parallel vote tabulation* (PVT). "Apalagi jika metodologi *quick count* juga tidak dijabarkan ke publik. Padahal, sosialisasi tentang metode menjadi syarat utama sebagai tanggung jawab intelektual." (* /P-3)

Jaksa Cirus kembali Diperiksa Bareskrim

POLRI menggeledah rumah mantan kuasa hukum Gayus HP Tambunan, Haposan Hutagalung, beberapa hari yang lalu. Penggeledahan itu dilakukan untuk mendapatkan alat bukti yang memperkuat pemeriksaan terhadap jaksa Cirus Sinaga, tersangka kasus rencana tuntutan palsu mafia pajak Gayus Tambunan. Cirus dijadwalkan untuk diperiksa hari ini, berselang lebih dari dua bulan sejak dilaporkan Kejaksaan Agung.

"Pelaksanaan penggeledahan di rumah Haposan itu beberapa hari yang lalu. Hasilnya, ada beberapa dokumen yang dianggap penting yang diharapkan dapat menjadi petunjuk pemeriksaan terhadap tersangka (Cirus). Artinya dokumen itu bisa menjadi bahan, referensi. Dokumen itu alat bukti," papar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Boy Rafli Amar. (* /P-3)

DPRD Gunungkidul Dukung Penetapan



PENGAWALAN KETAT: Anggota DPRD Fraksi Demokrat Kabupaten Gunungkidul mendapat pengawasan ketat saat masuk kendaraan taktis milik Brimob untuk meninggalkan Gedung DPRD, kemarin.

SETELAH DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Kabupaten Bantul, kemarin, giliran DPRD Kabupaten Gunungkidul mendukung penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Seluruh fraksi DPRD Gunungkidul menyetujui penetapan kepala daerah tersebut melalui Rapat Paripurna DPRD di Gedung DPRD Gunungkidul, kemarin. Hadir dalam kesempatan itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wakil Gubernur DIY Sri Paku Alam IX, Plt Bupati Gunungkidul Badingah, dan para pejabat pemerintahan Kabupaten Gunungkidul.

Ratusan warga Gunungkidul juga ikut mendengarkan rapat paripurna. Pengawasan khusus diberikan aparat kepolisian kepada anggota Fraksi Partai Demokrat Gunungkidul. Mereka dibawa ke lokasi rapat paripurna memakai kendaraan taktis Brimob Polda DIY.

Di luar gedung, sebanyak 1.431 anggota Paguyuban Dukuh se-Kabupaten Gunungkidul (Janaloka) menyampaikan orasi mendukung penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam

sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Mereka juga menolak pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) DIY secara langsung maupun lewat DPRD.

"Ini sebagai wujud menjaga eksistensi sejarah negeri Ngayogyakarta Hadiningrat," terang Ketua umum Paguyuban Dukuh se-Kabupaten Gunungkidul Sutiyono.

Sutiyono juga mengajak para warga untuk berhati-hati terhadap tawaran politik uang maupun bentuk-bentuk lain yang bersifat provokasi untuk memaksakan pemilu kada DIY.

Dengan demikian, tinggal DPRD Kabupaten Sleman, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta yang belum menyatakan sikap mendukung penetapan Sultan dan Paku Alam sebagai kepala daerah Yogyakarta.

Ditemui terpisah, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Gunungkidul. Mereka dibawa ke lokasi rapat paripurna memakai kendaraan taktis Brimob Polda DIY. Di luar gedung, sebanyak 1.431 anggota Paguyuban Dukuh se-Kabupaten Gunungkidul (Janaloka) menyampaikan orasi mendukung penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam



KRISIS KEPIMPINAN: Wakil Ketua MPR Hajriyanto Thohari memberikan pandangannya saat berdialog dengan Petisi 28 di gedung parlemen, Jakarta, kemarin. Petisi 28 mendesak untuk segera menata ulang Indonesia yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila serta menguatkan kembali fungsi dan struktur kelembagaan negara di tengah krisis kepemimpinan nasional.

Sistem dan Ekonomi Picu Aksi Joki Napi

Praktik joki napi seperti yang terjadi di Bojonegoro sangat mungkin terjadi di daerah lain.

NURULIA JUWITA SARI

SISTEM administrasi dan manajemen perkara yang manual dan tidak terintegrasi dicurigai menjadi penyebab terbukanya peluang praktik joki narapidana. Penilaian itu terdapat dari anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Mas Achmad Santosa, kemarin. "Case management yang manual dan tidak terintegrasi lebih membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan," ujarnya.

Penyebab lainnya, menurut Ota (sapaan Mas Achmad Santosa), standar moralitas penegak hukum yang sangat rendah. "Ini terlihat dari tanpa takut dan rasa bersalah petugas kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat

dapat bersama-sama memuluskan praktik joki ini," katanya. Dengan demikian, Ota menandakan, praktik napi joki seperti yang terjadi di Bojonegoro sangat mungkin terjadi di daerah lain. "Krisis moral para aparat di level bawah ini karena langka teladan serta pengawasan melekat dan fungsional yang tidak berjalan. Dugaan kuat modus ini juga kerap kali terjadi di tempat lain."

Hingga saat ini, tim satgas masih melakukan penelusuran ke lapangan dan bekerja sama dengan tim dari kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM.

Satgas, menekankan beberapa pembenahan yang harus dilakukan untuk menutup celah praktik-praktik mafia hukum. Yang utama, menurut Ota,

adalah penerapan sistem berbasis teknologi informasi dalam sistem hukum. "Sudah saatnya sistem IT dalam *integrated criminal justice system* diterapkan sejak seseorang menjadi tersangka dan diperiksa. Sehingga data dan identitas lengkap sudah di-input dalam *database* secara *online*," tegasnya.

Penjara yang overload menjadikan oknum aparat berani dan berpeluang menukar tahanan. Jumlah napi terlalu banyak."

Nasir Jamil
Anggota Komisi III DPR dari F-PKS

Selain itu, ia menilai, kenaikan remunerasi di kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, serta kepolisian menjadi penting untuk mencegah dan mengikis praktik-praktik ma-

fia. Peran organisasi profesi advokat, sambung dia, juga diperlukan untuk ikut membenahi anggotanya. "Terutama dalam hal pengawasan. Sekarang sudah cukup banyak advokat diduga menjadi *key players* mafia hukum. Tapi organisasi advokat diam saja. Seharusnya advokat sebagai penegak hukum seperti juga JAM-Was dan Irjen periksa advokat itu. Karena ini menyangkut etika profesi dan kemungkinan tindak pidana," tutupnya.

Susah dikenali
Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi PKS Nasir Jamil menilai, penghuni penjara yang sudah melebihi kapasitas menjadi penyebab lemahnya pengawasan. Petugas, kata dia, jadi sulit mengenali wajah narapidana satu per satu. Keadaan itulah, menurut Nasir, yang menjadi celah praktik joki napi. "Karena penjara yang *overload* menjadikan oknum

aparat berani dan berpeluang menukar tahanan. Napi terlalu banyak sehingga wajahnya tidak bisa dikenali satu per satu," tuturnya.

Saat dihubungi terpisah, Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar menilai, kasus joki bukanlah persoalan baru. "Ini masalah lama, malah di zaman Orde Baru kasus seperti itu tidak hanya terjadi di daerah. Terjadi juga di kota besar, termasuk di Jakarta," cetusnya.

Khusus kasus joki napi di Bojonegoro, ia menilai, hal itu disebabkan motif ekonomi dan tabiat korupsi yang belum bisa lepas. Dia juga menekankan, pentingnya sanksi tegas bagi para pelaku. "Kami menuntut Jaksa Agung untuk membuktikan janjinya menindak jaksa nakal. Tidak hanya diberhentikan, tetapi diteruskan secara pidana," tutupnya. (ED/S-8)

nuruliah@mediaindonesia.com

Mahmil Tetap Junjung Keadilan

PROSES yang berlangsung di peradilan militer terkait aksi kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah prajurit TNI di Papua, beberapa waktu lalu, tetap digelar dengan mengedepankan rasa keadilan.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono sesuai menghadiri peringatan HUT ke-4 Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) di Jakarta, kemarin. "Ya, tentu kita akan penuh rasa keadilan itu. Kita tidak mungkin mengabaikan itu," katanya.

Lantaran itulah, Panglima TNI menegaskan hukuman yang diberikan Mahkamah Militer (Mahmil) terhadap para prajurit pelaku kekerasan itu sangat berat. "Selain diberikan hukuman kurungan, yang bersangkutan juga dikeluarkan dari kedinasan," tandasnya.

Panglima TNI menjelaskan, aksi pelaku kekerasan di Papua itu murni merupakan tindak kriminal, indiscipliner. Hanya saja, Panglima TNI mengingatkan, penugasan di



KUNJUNGAN KAPUSPEN TNI: Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul (kiri) didampingi Pemimpin Redaksi Metro TV Elman Saragih meninjau ruang redaksi Metro TV saat bersilaturahmi dengan Media Group di Kedoya, Jakarta Barat, kemarin.

daerah rawan konflik sangat berbeda dengan penugasan di daerah normal. "Di daerah rawan konflik masih terdapat kelompok bersenjata yang harus diwaspadai

cukup ketat. Jadi psikologinya berbeda," paparnya. Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan ada tiga kasus kekerasan yang di-

lakukan prajurit TNI di Papua sepanjang 2010. Senada dengan itu, Kapuspen TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul kepada Media Indonesia mengatakan,

aksi kekerasan itu terjadi di luar tugas dan karena situasi di Papua. "Itu pelanggaran pidana biasa karena tidak menimbulkan korban jiwa. Mereka itu melanggar kewenangan dalam tugasnya sebagai TNI," tuturnya.

Dalam kunjungan ke kantor redaksi Metro TV dan Media Indonesia, di Kedoya, Jakarta Barat, Kapuspen TNI juga menyatakan kesiapan pihaknya bekerja sama dengan media dalam pertukaran informasi yang akurat dan jelas. Kapuspen pun berjanji menyediakan fasilitas pendukung. "Keterbukaan kepada media itu perlu karena dibutuhkan kritik untuk membangun TNI yang lebih baik. Kami dari TNI siap bekerja sama dengan media dalam memberikan informasi yang akurat. Hubungan baik dengan media juga bisa memunculkan keseimbangan berita dan keseimbangan dialog," imbuhnya. Pernyataan Kapuspen itu disambut positif Pemimpin Redaksi Metro TV Elman Saragih. (* /S-8)